

**KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN REKENING TIDAK AKTIF
OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**

SKRIPSI



Oleh :

ACHMAD ROFI ROMADHONI

NPM : 22300151

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN REKENING TIDAK AKTIF
OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ACHMAD ROF'I ROMADHONI

22300151

SURABAYA, 11 Desember 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

R. EDI KRISHARIYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv DR. DWI TATAK SUBAGYO, S.H., M.HUM

**KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN REKENING TIDAK
AKTIF OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ACHMAD ROF'I ROMADHONI

22300151

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL

11 DESEMBER 2025 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI

PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. DR. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H. KETUA 1.....

2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum. ANGGOTA 2.....

3. DR. DWI TATAK SUBAGYO, S.H., M.Hum. ANGGOTA 3.....

MOTTO

"Dalam setiap perjalanan, kamu Adalah tujuan yang menenangkan"

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena harmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN REKENING TIDAK AKTIF OLEH PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, dorongan, bimbingan, dukungan, motivasi dan semangat dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahni Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis dalam perkuliahan.
3. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang tela memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku Kepala Program Studi S1 Fakulas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Tutor sidang proposal skripsi.

7. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama pengerjaan skripsi.
8. Ibu saya tercinta, Whelia Nurhariningsih, serta Nenek, Siti Rahayu dan saudara yang senantiasa memberi dukungan moral, materiil, semangat, nasehat, serta doa demi kelancaran penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Reza Sukma Dewi, yang telah memberikan dukungan moral, perhatian, motivasi, dan kesabaran dalam menemani proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran, doa, dan perhatian yang tulus yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis.
10. Sahabat – Sahabat penulis dari kecil Tio dan Ranca yang telah menghibur, menemani, doa, dan memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi penulis.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran maupun dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan sara dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kalian semua akan terbalaskan oleh Allah SWT.

Surabaya, 11 Desember 2025



Penulis

Achmad Rof'I Romadhoni

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Rof'I Romadhoni

NPM : 22300151

Alamat : Jalan Banyu Urip Lor I no. 37

Email : Rofirmd86@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Kebijakan Pemblokiran Rekening Tidak Aktif Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasi di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Univesitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 11 Desember 2025

Yang menyatakan



Achmad Rof'I Romadhoni

NPM : 22300151

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Pemblokiran Rekening Tidak Aktif oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik rekening nasabah yang secara hukum dapat diblokir oleh PPATK serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum PPATK atas kerugian yang dialami nasabah dan pihak bank akibat kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (*dormant*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemblokiran rekening oleh PPATK tidak dapat dilakukan semata-mata karena status rekening tidak aktif (*dormant*), melainkan harus didasarkan pada adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan mencurigakan, ketidakwajaran pola transaksi terhadap profil nasabah, atau kecocokan identitas dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM). Rekening aktif maupun rekening pasif pada prinsipnya tetap merupakan hak milik nasabah yang dilindungi hukum, sehingga setiap tindakan pemblokiran harus dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang ditentukan, dan disertai mekanisme pertanggungjawaban hukum guna menjamin perlindungan hak nasabah dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Kebijakan, Kewenangan, Rekening *Dormant*, Perlindungan Hak Nasabah.

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Policy on Freezing Inactive Bank Accounts by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)". This research aims to analyze the legal characteristics of bank accounts that may be lawfully frozen by PPATK and to examine the forms of PPATK's legal accountability for losses suffered by customers and banks as a result of the policy of freezing inactive (dormant) bank accounts. The research employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

The findings indicate that the freezing of bank accounts by PPATK cannot be based solely on the dormant status of an account, but must be supported by indications of suspicious financial transactions, the existence of suspicious transaction reports, abnormal transaction patterns that are inconsistent with the customer's profile, or a match with the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the Proliferation Financing Prevention List (DPPSPM). Both active and inactive accounts remain legally protected as the property of customers; therefore, any freezing measure must be carried out proportionally, within lawful authority, in accordance with prescribed procedures, and accompanied by clear mechanisms of legal accountability to ensure the protection of customers' rights and legal certainty.

Keywords: policy, authority, dormant account, customer protection

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
1.1 Latar Belakang.....	1
2.1 Rumusan Masalah.....	9
3.1 Tujuan Penelitian.....	9
4.1 Manfaat Penelitian.....	10
4.1.1 Manfaat Akademis.....	10
4.1.2 Manfaat Praktis.....	11
5.1 Kerangka Konseptual.....	11
5.1.1 Teori Kewenangan.....	11
5.1.2 Konsep Kebijakan.....	12
6.1 Metode Penelitian.....	13
6.1.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah.....	13
6.1.2 Sumber Bahan Hukum.....	15
6.1.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
6.1.4 Analisa Penelitian.....	18
7.1 Pertanggung Jawaban Sistematis.....	19
BAB II KARAKTERISTIK REKENING NASABAH YANG DAPAT DIBLOKIR OLEH PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.....	21
2.1. Pengertian Rekening dan Rekening Dormant.....	21
2.2. Pemblokiran Rekening: Blokir Internal dan Blokir Eksternal.....	24
2.2.1. Blokir Rekening Internal.....	24
2.2.2. Blokir Rekening Eksternal.....	26
2.3. Kewenangan Lembaga Terkait dalam Pemblokiran Rekening Nasabah.....	28
2.4. Kedudukan dan Fungsi PPATK dalam Sistem Keuangan Nasional.....	33
2.4.1. Dasar Hukum Kewenangan PPATK dalam Pemblokiran Rekening.....	35
2.4.2. Batasan Kewenangan PPATK dalam Melakukan Pemblokiran Rekening	36
2.4.3. Rasionalisasi Hukum atas Kewenangan Pemblokiran oleh PPATK.....	37
2.4.4. Hubungan Kewenangan PPATK dengan Bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	38

2.5. Karakteristik Karakteristik Rekening Aktif dan Rekening Pasif (Dormant)	40
2.5.1 Karakteristik Rekening Aktif.....	40
2.5.2 Karakteristik Rekening Pasif (Dormant)	41
2.6. Karakteristik Rekening Nasabah yang Dapat Diblokir oleh PPATK	43
2.6.1. Konsep dan Dasar Hukum Rekening yang Dapat Diblokir.....	43
2.6.2. Indikator Transaksi Mencurigakan	44
2.6.3. Keterkaitan Rekening Dormant dengan Pemblokiran	45
2.6.4. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Pemblokiran Rekening Nasabah.....	46
2.6.5. Analisis Yuridis Karakteristik Rekening yang Layak Diblokir	48
BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) ATAS KERUGIAN NASABAH DAN PIHAK BANK AKIBAT KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN REKENING TIDAK AKTIF	49
3.1 Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum PPATK	51
3.1.1 Pertanggungjawaban Administratif	52
3.1.2. Pertanggungjawaban Perdata.....	54
3.1.3. Pertanggungjawaban Pidana	57
3.2. Pertanggungjawaban Internal dan Eksternal PPATK	59
3.2.1 Pertanggungjawaban Internal PPATK	60
3.2.2 Pertanggungjawaban Eksternal dan Antar Lembaga PPATK	62
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR BACAAN	